

PENGARUH INDIKATOR *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE*

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016)

THE IMPACT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE INDICATOR ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE

(Study of Manufacture Companies Listed in Indonesian Stock Exchange 2011-2016)

Izza Ariqah R. Yusran¹, Dr. Farida Titik Kristanti, S.E., M.Si.², Wiwin Aminah, S.E., M.M., Akt.³

^{1,2,3}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹izzariqah@student.telkomuniversity.ac.id, ²farida_titik@telkomuniversity.ac.id, ³wiiwinaminah@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah pertanggung jawaban perusahaan atas segala dampak negatif yang mungkin dan atau yang telah disebabkan oleh perusahaan. *Good Corporate Governance (GCG)* adalah seperangkat konsep yang mengatur proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan. CSR dan GCG merupakan dua fenomena yang saling berhubungan satu sama lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh indikator GCG yaitu kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan komite audit terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* atau pengungkapan CSR terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2011- 2016 baik secara simultan maupun parsial. Metode analisis yang digunakan adalah pengujian statistik deskriptif dan analisis regresi data panel menggunakan *Eviews 8*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Kata Kunci: CSR, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komite audit.

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is a responsibility of company for all negative impacts that may happen or already happened caused by the company. *Good Corporate Governance (GCG)* is a concept to regulate business control process that going continuously. CSR and GCG are two phenomenon which is related each other. This study aims to determine the impact of institutional ownership, size of commissioners, and audit committee on corporate social responsibility disclosure to manufacture sector listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) 2011-2016 simultaneously and partially. The analytical method are using testing of descriptive statistics and panel data regression analysis which is using *E-views 8*. The result of this research showed that size of commissioners gives positive impact significantly on corporate social responsibility disclosure. While institutional ownership and audit committee have no influence on corporate social responsibility disclosure.

Keywords: CSR, institutional ownership, size of commissioners, audit committee.

1. Pendahuluan

Sektor manufaktur merupakan pemberi kontribusi PDB terbesar. Peningkatan pendapatan sektor manufaktur mulai dari tahun 2011 hingga 2016, menunjukkan bahwa kinerja perusahaan-perusahaan pada sektor tersebut terus menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Selain itu, sektor ini juga berperan besar dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Hal-hal inilah yang mendasari banyak investor yang berinvestasi pada sektor manufaktur, sehingga memungkinkan sektor ini untuk terus berkembang dan memberi kontribusi yang besar untuk pada PDB Indonesia. Sebagai pemberi kontribusi PDB terbesar dan memegang peranan yang besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, eksistensi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini perlu dipertahankan. Salah satunya dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan / *Corporate Social Responsibility (CSR)* kepada masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Karena masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* yang berpengaruh pada keberlangsungan perusahaan-perusahaan tersebut. Bukan hanya karena itu, perkembangan CSR juga terkait dengan semakin parahny kerusakan lingkungan. Sedangkan manufaktur merupakan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) (www.kemenkeu.go.id).

Menurut Pedoman GCG yang di terbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governace (KNKG) Indonesia (2012), terdapat 5 prinsip GCG dalam pelaksanaannya, yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency), serta kewajaran

dan kesetaraan (fairness). Implementasi GCG diperlukan agar dapat menjaga kelangsungan jangka panjang dari suatu usaha dengan tetap mematuhi perundang-undangan serta etika yang berlaku. Salah satu bentuk implementasi dari GCG adalah pelaksanaan CSR. Bila dikaitkan dengan prinsip GCG, pelaksanaan CSR merupakan wujud dari prinsip responsibility. Tidak hanya pelaksanaannya yang bersifat wajib, dalam UU No. 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat 2 bagian C dan UU No. 32 Tahun 2009 pasal 68 bagian A juga mewajibkan pengungkapan pelaksanaan CSR.

Implementasi dari prinsip transparency membuat informasi mengenai perusahaan terkait mudah diperoleh bagi pihak yang membutuhkannya. Pentingnya pengungkapan CSR juga agar perusahaan tidak diklaim lepas tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Pengungkapan CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas perusahaan tersebut kepada publik dan juga sebagai usaha untuk menjaga eksistensi perusahaan tersebut di masyarakat (Yulfajar, 2013). Terlebih lagi untuk perusahaan yang dalam operasionalnya sangat berpotensi untuk mencemari lingkungan seperti sektor manufaktur, menurut Pasaribu, Rowanda, dan Kurniawan (2015) perusahaan manufaktur dalam operasionalnya untuk mencapai laba seringkali mengakibatkan munculnya masalah sosial dan lingkungan. Tidak hanya itu, perusahaan manufaktur merupakan penghasil limbah lingkungan alam yang berasal dari sisa-sisa hasil produksi dan dapat membusuk dengan cepat. Mikroba dapat berkembang di tanah, udara dan air dan menyebabkan penyakit pada manusia dan binatang (Dewi, 2014).

Menurut Katharine Grace, wakil ketua umum Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA), Indonesia memiliki peranan penting dalam perkembangan GCG bagi negara-negara ASEAN, tidak hanya itu, Franciscus Welirang selaku ketua umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) mengatakan bahwa sejauh ini penerapan GCG oleh para emiten di Indonesia sudah baik (id.beritasatu.com). Hal ini berarti seharusnya tingkat pengungkapan CSR di Indonesia juga telah dapat dikategorikan baik, karena semakin baik standar GCG suatu perusahaan, maka pengungkapan CSR juga akan baik (www.mongabay.co.id). Namun sayangnya hal ini berbeda dengan realita yang terjadi, diketahui dari hasil penelitian Defri (2012) dan Santy (2012) saat ini tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah. Bahkan Hasan Fauzi, ketua Forum Governance dan CSR Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI-KAPd), sangat menyayangkan sedikitnya jumlah perusahaan di Indonesia yang melakukan pengungkapan CSR, tercatat hanya sekitar 100 perusahaan dari semua perusahaan di Indonesia yang melakukan pengungkapan CSR (www.solopos.com).

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1. Dasar Teori

2.1.1 Agency Theory

Dalam *agency theory* atau teori agensi membahas mengenai pentingnya pemisahan manajemen dan pengelolaan perusahaan dari kepemilikan perusahaan. Sutedi (2011:13) berpendapat bahwa tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan maksimal mungkin dengan menggunakan biaya seminim mungkin. Dengan demikian dimungkinkan terjadinya masalah-masalah yang disebut dengan, masalah-masalah keagenan (*agency problems*) (Suharto, 2015). Konflik keagenan juga muncul karena pemegang saham tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja manajer perusahaan

2.1.2 Legitimacy Theory

Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan kepada *society*, operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan masyarakat (Hadi, 2011:88). Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. (Sinaga, 2011).

2.1.3 Stakeholder Theory

Di dalam teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang seharusnya beroperasi hanya untuk kepentingan sendiri, namun perusahaan juga harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya. Hadi (2011:110) berpendapat bahwa teori ini mempertegas keberadaan perusahaan di tengah lingkungan tidak dapat dilepaskan dari *stakeholder*.

2.1.4 Kepemilikan Institusional terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure

Merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain), kecuali anak perusahaan dan institusi lain yang memiliki hubungan istimewa (perusahaan afiliasi dan perusahaan asosiasi). Kepemilikan saham institusional dinyatakan dalam persen (%) yang diukur dengan cara membandingkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional dengan jumlah saham yang beredar (Iswandika *et al*, 2014).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

(1)

2.1.5 Ukuran Dewan Komisaris terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure

Menurut Iswandika *et al* (2014) dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris dapat dikatakan pula sebagai wakil dari para investor atau pemilik perusahaan untuk mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (Pasaribu *et al*, 2015). Ukuran dewan komisaris yang dipakai dalam penelitian ini konsisten dengan Ale (2014) yaitu menggunakan jumlah anggota dewan komisaris.

$$UDK = \Sigma \text{ Dewan Komisaris Perusahaan}$$

(2)

2.1.6 Komite Audit terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure

Komite audit terdiri dari sedikitnya 3 orang, di ketuai oleh komisaris independen perusahaan dan 2 orang eksternal yang independen serta menguasai maupun memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Sutedi, 2011:160). Peran komite audit sangat penting karena peran tersebut menempatkannya pada titik temu antara direksi/manajemen, auditor independen, auditor internal, dan Komisaris. Komite audit diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Yaitu jika perusahaan memiliki komite audit sedikitnya 3 akan diberi kode 1 sedangkan jika perusahaan memiliki komite audit kurang dari 3 akan diberi kode 0.

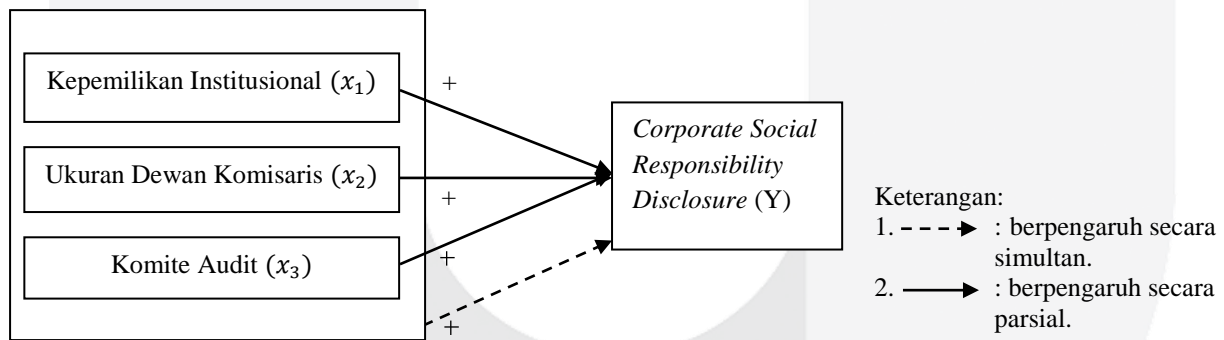
2.1.7 Corporate Social Responsibility Disclosure

Corporate social responsibility disclosure atau pengungkapan CSR perusahaan dalam laporan tahunan bersifat wajib (*mandatory disclosure*). Dan berdasarkan Bapepam no. 134 / BL / 2006 tanggal 7 Desember 2006, perusahaan-perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharuskan mengungkapkan uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan CSR memiliki 78 *item*. Masing-masing *item* pada tiap kategori pengungkapan diberi skor 1 sehingga jika perusahaan melakukan pengungkapan 1 *item* saja akan diberi skor 1 dan jika dalam perusahaan tidak mengungkapkan akan diberi skor 0.

$$CSRI = \frac{\Sigma \text{ item yang diungkapkan}}{78}$$

(3)

Berikut merupakan pemaparan gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.2. Metodologi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.	141
2	Perusahaan manufaktur yang tidak konsisten mempublikasikan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.	(99)
3	Perusahaan manufaktur yang tidak melakukan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan (<i>annual report</i>) dan tidak memiliki data lengkap (sesuai variabel independen) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.	(23)

Jumlah Sampel	19
---------------	----

Sumber: Data yang telah diolah (2017).

Total data sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 114 data sampel yang terdiri dari 19 perusahaan dengan periode waktu penelitian selama 6 tahun. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi data panel. Model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana :

Y = Corporate Social Responsibility Disclosure

X₁ = Kepemilikan Instiusional

X₂ = Ukuran Dewan Komisaris

X₃ = Komite Audit

α = Konstanta

β₁, β₂, β₃ = Koefisien regresi masing-masing variabel

ε = Error term

3. Pembahasan

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel berikut:

Tabel 2 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	KI	UDK	KA	CSR
MEAN	71.62	5.92	0.97	47.76
MAX	95.78	13.00	1.00	73.08
MIN	27.75	2.00	0.00	15.38
STD.DEV	14.73	2.48	0.16	14.69

Sumber: data yang diolah (2017)

Hasil dari uji deskriptif dalam penelitian ini menjelaskan secara deskriptif masing-masing variabel yang digunakan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai rata-rata (*mean*) yang lebih besar dari standar deviasi yang berarti bahwa variabel operasional tersebut mengelompok atau tidak bervariasi.

3.2. Analisis Regresi Data Panel

3.2.1 Uji Chow

Chow Test merupakan metode pengujian yang digunakan untuk memilih apakah model yang akan digunakan *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Hipotesis yang dilakukan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H₀ = *Common Effect Model*

H₁ = *Fixed Effect Model*

Tabel 3 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: FIX			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	29.104962	(18,92)	0.0000
Cross-section Chi-square	216.745772	18	0.0000

Sumber: *Output Eviews 8.0* (data yang telah diolah)

Berdasarkan hasil uji *fixed effect*, diperoleh nilai probabilitas *cross-section Chi-square* sebesar 0.0000 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% dan nilai probabilitas *cross-section F* sebesar 0.0000 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*p-value*) < 0,05 yang berarti H₁ diterima dan H₀ ditolak. Maka selanjutnya akan dilakukan uji Hausman yaitu pengujian antara metode *fixed effect* dan *random effect*.

3.2.1 Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih apakah model yang akan digunakan *fixed effect* atau *random effect*. Dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H₀ = *Random Effect Model*

$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$

Tabel 4 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: RANDOM			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.953909	3	0.0075

Sumber: Output Eviews 8.0 (data yang telah diolah)

Berdasarkan hasil uji Hausman, diperoleh nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0.0075 yang menunjukkan lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0.05. Maka H_0 ditolak yang berarti penelitian ini menggunakan metode *fixed effect model*. Tabel 5 merupakan hasil uji dengan model *fixed effect*:

Tabel 5 Fixed Effect Model

Cross-section fixed effects test equation:				
Dependent Variable: CSR				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/11/17 Time: 02:47				
Sample: 2011 2016				
Periods included: 6				
Cross-sections included: 19				
Total panel (balanced) observations: 114				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KI	-0.047329	0.085245	-0.555206	0.5799
UDK	2.618381	0.508179	5.152480	0.0000
KA	-2.514293	7.833998	-0.320946	0.7489
C	38.09615	10.05700	3.788024	0.0002
R-squared	0.197215	Mean dependent var	47.76202	
Adjusted R-squared	0.175321	S.D. dependent var	14.68898	
S.E. of regression	13.33933	Akaike info criterion	8.053769	
Sum squared resid	19573.16	Schwarz criterion	8.149776	
Log likelihood	-455.0648	Hannan-Quinn criter.	8.092733	
F-statistic	9.007676	Durbin-Watson stat	0.709101	
Prob(F-statistic)	0.000022			

Sumber: Output Eviews 8.0 (data yang telah diolah)

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui nilai koefisien regresi data panel sehingga dapat dibentuk persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{CSR} = 38.09615 - 0.047329 \text{ KI} + 2.618381 \text{ UDK} - 2.514293 \text{ KA}$$

3.3. Pengujian Hipotesis

3.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Dapat dilihat pada tabel 5 bahwa nilai R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0.197215 atau 19,72%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan komite audit mampu menjelaskan variabel *corporate social responsibility disclosure* sebesar 19,72%, sedangkan sisanya sebesar 80,28% dijelaskan oleh variabel lain.

3.3.2 Uji Simultan (Uji F)

Nilai probabilitas (F-statistic) pada tabel 5 sebesar 0.000022 yang artinya nilai probabilitas $< 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan komite audit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

3.3.3 Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 5 dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel kepemilikan institusional (X_1) memiliki nilai probabilitas (p-value) 0.5799 nilai ini lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05 (5%) dan memiliki arah yang positif. Hal tersebut menunjukkan

bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* sehingga $H_{0,2}$ ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2010), Djuataningsih dan Marsyah (2012), Iswandika *et al* (2014), serta penelitian Handayani dan Rochayatun (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Hal ini bisa saja disebabkan karena investor belum mempertimbangkan masalah pengungkapan CSR sebagai salah satu hal penting atau kriteria dalam menanamkan modal pada perusahaan, sehingga para investor institusional cenderung tidak memperhatikan tingkat persentase pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan.

2. Variabel ukuran dewan komisaris (X_2) memiliki nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.0000, nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05 (5%) dan memiliki arah yang positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* sehingga $H_{0,3}$ diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iswandika *et al* (2014), Pasaribu *et al.* (2015) serta penelitian Handayani dan Rochayatun (2015) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Hal ini berarti semakin banyak jumlah dewan komisaris maka semakin luas pengungkapan CSR dalam laporan tahunan. Tugas dewan komisaris adalah menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas, oleh karena itu semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka tugas-tugas tersebut dapat semakin efisien dan efektif untuk dilaksanakan.

3. Variabel komite audit (X_3) memiliki nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.7489, nilai ini lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05 (5%) dan memiliki arah yang negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* sehingga $H_{0,4}$ ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Djuataningsih dan Marsyah (2012) serta penelitian Pasaribu *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Hal ini bisa saja disebabkan karena keputusan-keputusan mengenai pengelolaan perusahaan tetap dipegang oleh dewan direksi dan komisaris, sehingga komite audit tidak mampu berbuat banyak termasuk mengenai tingkat pengungkapan CSR.

4. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan komite audit terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Dan dilakukan terhadap perusahaan pada sektor manufaktur tahun 2011-2016 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperoleh 19 sampel perusahaan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat diketahui bahwa dari 114 data sampel pada penelitian ini, terdapat 64 data sampel yang memiliki nilai kepemilikan institusional di atas rata-rata dan sebanyak 50 data sampel yang memiliki nilai di bawah rata-rata. Untuk ukuran dewan komisaris terdapat 66 data sampel yang memiliki nilai di atas rata-rata dan sebanyak 48 data sampel yang memiliki nilai di bawah rata-rata. Sedangkan untuk komite audit terdapat 111 data sampel yang memiliki nilai di atas rata-rata dan sebanyak 3 data sampel yang memiliki nilai di bawah rata-rata.

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, menunjukkan bahwa variabel independen yaitu kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan komite audit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen yaitu *corporate social responsibility disclosure* pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2016. Namun secara parsial, hanya variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ale, Lusiana. (2014). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. 1-19. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- [2] Dewi, Kartika. (2014). Analisa *Environmental Cost* pada Perusahaan Non-Kuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011, 2012 dan 2013. *Jurnal Binus Business Review*. Vol . 5 No 2. 615-625. Universitas Bina Nusantara.
- [3] Frondika, Defri. (2012). *Analisis Perbandingan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bei Tahun 2011 Berdasarkan Global Reporting Initiatives (GRI) G3.1*. Thesis Universitas Bina Nusantara Jakarta: Tidak Diterbitkan.
- [4] Hadi, Nor. (2011). *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- [5] Iswandika, Ryandi, Murtanto, dan Emma Sipayung. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan, *Corporate Governance*, dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *E-journal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti*. Vol.1, No.2. Universitas Trisakti.
- [6] Jalal, Sita Supomo, dan Victor Rembeth. (2016). *Mengapa RUU CSR Harus Ditolak?*. [online]. <http://www.mongabay.co.id/2016/07/04/mengapa-ruu-csr-harus-ditolak/> [21 Juli 2017]
- [7] Kania, Devie. (2017). *Perhatikan GCG*. [online]. <http://id.beritasatu.com/marketandcorporatenews/perhatikan-gcg/167506> [8 November 2017]
- [8] Kementerian Keuangan. (2016). *Industri Berbasis Sumber Daya Alam, Masa Depan Indonesia*. [online]. <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/industri-berbasis-sumber-daya-alam-masa-depan-indonesia> [10 Oktober 2016]
- [9] Komite Nasional Kebijakan Governance. (2012). Prinsip Dasar Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia. Jakarta: KNKG.
- [10] Pasaribu, Rowland B. F., Kowanda, Dionysia., dan Kurniawan, Dian. (2015). Pengaruh *Earning Management* dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Emiten Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*. Vol. 10 No. 2. 97-121. Universitas Gunadarma.
- [11] Prasetyo, Sindhu. (2017). *ICSA akan Gelar Konferensi GCG*. [online]. <http://id.beritasatu.com/lifestyle/icsa-akan-gelar-konferensi-gcg/167064> [27 Oktober 2017]
- [12] Ryanthie, Septhia. (2017). Pengamat Sebut Dana CSR Harus Bebas dari Kepentingan Politik. [online]. <http://www.solopos.com/2017/03/09/pengamat-sebut-dana-csr-harus-bebas-dari-kepentingan-politik-799993> [16 Maret 2017]
- [13] Santy. (2012). *Pelaporan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Pertambangan Batubara di Indonesia dan Australia yang Tercatat di Bursa Saham*. Thesis Universitas Bina Nusantara Jakarta: Tidak Diterbitkan.
- [14] Sinaga, Adriyati M. (2011). *Pengaruh Elemen Corporate Governance terhadap Pelaporan Corporate Social Responsibility pada Sektor Perbankan di Indonesia*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang: Tidak Diterbitkan.
- [15] Suharto, Ippolita. (2015). *Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan*. Skripsi Universitas Negeri Semarang: Tidak Diterbitkan.
- [16] Sutedi, Adrian. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika..
- [17] Yulfajar, Amrina. (2013). Analisis atas Tingkat Kepatuhan Pengungkapan CSR Oleh Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Media Mahardhika*. Vol. 11 No. 3. Universitas Surabaya.